

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Yabes Edison Nesimnasi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

nesimnasieddy@gmail.com

Linda Lomi Ga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

linda.ga@staf.undana.ac.id

Cicilia A. Tungga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

cicilia.tungga@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan SIMDA keuangan pada Sekretariat Daerah (SETDA) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta mengetahui faktor-faktor penyebab yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah dalam menerapkan SIMDA keuangan, serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapannya. Responden dalam penelitian sebanyak 5 orang yang terdiri dari pegawai Sekretariat Daerah yaitu Pegawai Bagian Penatausahaan, Pegawai Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan serta Kepala Bagian. Data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para responden menggunakan panduan wawancara, observasi langsung terhadap aktivitas-aktivitas para pegawai Sekretariat Daerah serta studi dokumentasi atas Wawancara. Hasil wawancara dan data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai Sekretariat Daerah sudah memahami makna SIMDA keuangan serta gambaran pelaksanaannya yang berkaitan dengan input dan output datanya. Faktor-faktor yang dimiliki dalam pelaksanaan penerapan SIMDA keuangan yaitu komunikasi, sumber daya manusia, sikap/disposisi dan struktur birokrasi, adapun kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan yaitu andal, tapi belum tepat waktu serta relevan.

Kata kunci: *Akuntansi, SIMDA Keuangan, Penerapan, Faktor-faktor, Kualitas Informasi.*

ABSTRACT

This study aims to obtain an overview of the implementation of financial SIMDA at the Regional Secretariat (SETDA) of the South Central Timor Regency Government, as well as to find out the causal factors that the Regional Secretariat has in implementing financial SIMDA, as well as the quality of information resulting from its implementation. Respondents in the study were 5 people consisting of Regional Secretariat employees, namely Administrative Section Employees, Accounting and Reporting Section Employees, Head of Finance and Reporting Sub Division and Section Head. Data were collected through direct interviews with respondents using interview guides, direct observation of the activities of the Regional Secretariat employees and documentation studies of related documents. The results of the interviews and the collected data were analyzed by descriptive method using a phenomenological approach. The results of the study indicate that in general the employees of the Regional Secretariat have understood the meaning of financial SIMDA and the description of its implementation related to input and output data. The factors possessed in implementing the implementation of SIMDA Finance are communication, human resources, attitude/disposition and bureaucratic structure, while the quality of information generated from the implementation of SIMDA Finance is reliable, but not timely and relevant.

Keywords: *Accounting, SIMDA Finance, Implementation, Factors, Information Quality.*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia, pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian disempurnakan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai berikut “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik; (i) relevan yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu, (ii) andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (iii) dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya, (iv) dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. (Leatemia dan Usmany, 2021).

Salah satu faktor laporan keuangan yang handal adalah ketepatan waktu untuk menyajikan laporan keuangan. Ketepatan waktu laporan keuangan secara tegas dinyatakan sebagai karakteristik kualitatif penting laporan keuangan. Apabila laporan keuangan disajikan terlambat maka laporan keuangan tersebut akan kehilangan kekuatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu

ketepatan waktu dalam menyelesaikan laporan keuangan yang dilakukan pemerintah guna memperoleh pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.(DJPK, 2005)

Fenomena Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah ialah suatu hal yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut, pada kenyataannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak keterlambatan dan penyimpangan penyimpangan. Karena itu pemerintah menyarankan untuk menggunakan Aplikasi SIMDA, agar Laporan Keuangan yang dibuat bisa akurat dan tepat waktu dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin memperoleh gambaran lebih jauh tentang

1. Bagaimana penerapan SIMDA keuangan khususnya tentang bagaimana pemahaman pegawai tentang SIMDA Keuangan,
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penerapan SIMDA Keuangan,
3. Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

KAJIAN TEORI

Agency Theory

Dalam Teori keagenan (*Agency Theory*) dijelaskan mengenai hubungan antara principal dan agent. Jensen dan MEckling (1976) mengartikan bahwa Teori keagenan (*Agency Theory*) adalah hubungan yang muncul ketika Satu Pihak (*principal*) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan pengambilan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan pengambilan keputusan sesuai kepentingan principal. Dalam sektor pemerintahan, masyarakat selaku *principal* memberikan

amanah kepada pemerintah selaku agent. Pemerintah selaku agen yang menjadi pemegang amanah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam teori keagenan yang diterapkan dalam pemerintahan mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara Pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai *principal*. Asimetri informasi terjadi ketika Pemerintah memberikan sinyal tentang kondisi dan laporan keuangan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui pengungkapan Informasi Akuntansi. Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu menyajikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas (Mardiasmo, 2004:24).

Teori Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 (2005) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan PP tersebut pengelolaan harus berdasarkan asas umum pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Subarsono, (2005) “implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu komunikasi (*Communications*), Sumber daya (*resource*), Sikap (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)”.

Keempat variabel tersebut dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian tanpa menggunakan angka statistik tetapi dengan pemaparan secara deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi menjadi fokus perhatiannya untuk kemudian dijabarkan sebagaimana adanya secara rinci.

Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penentuan jenis atau metode penelitian merupakan langkah awal dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan fenomenologi, menurut Creswell dalam Sugiyono, (2014) pendekatan fenomenologi adalah salah satu jenis pendekatan kualitatif dimana dalam pendekatan jenis ini peneliti melakukan sebuah observasi kepada partisipan untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam hidup partisipan tersebut.

Fokus Penelitian

Fokus penulisan dalam penelitian kualitatif ini adalah bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan yang akurat.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan serta dokumentasi/arsip perusahaan berupa gambaran umum, struktur organisasi dan *Job Description*

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yang berasal dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada Umumnya Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen dan lain-lain (Moleong, 2005). Secara garis besar data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Wawancara
2. Observasi
3. Studi Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mendeskripsikan pemahaman yang mendalam dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Daerah pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan Jumlah Pegawai Negeri Sipil sampai dengan tahun 2022 sebanyak 134 orang PNS, dengan komposisi PNS sebagai berikut

S2	: 9	Orang
S1	: 45	Orang
D3	: 6	Orang
SLTA	: 70	Orang
SLTP	: 4	Orang

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori dan metodologi penelitian yang telah diuraikan terdahulu, maka pada sub bab ini akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih, informan tersebut adalah para Kepala Bagian, Pegawai/Staf Keuangan yang terkait langsung dengan proses akuntansi di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal ini untuk menjamin validitas informasi yang disampaikan.

Data wawancara, data dokumentasi dan data observasi langsung yang diperoleh, maka dilakukan kode wawancara (Inisial Responden) yaitu :

1. PAB (Staf pelaksana SIMDA bag. Penatausahaan)
2. PAC (Staf pelaksana SIMDA bag. Akuntansi dan Pelaporan)
3. KAA (Kepala Bagian)
4. KAN (Kepala Sub Bagian Penanggungjawab Keuangan).

Selanjutnya dilakukan pemahaman untuk menemukan tema yang ada. Untuk mengetahui pemahaman pegawai tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan sejauh mana keberhasilan penerapan SIMDA Keuangan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten TTS maka ditemukan dua tema yaitu pemahaman makna SIMDA Keuangan dan tujuan penerapan SIMDA Keuangan, Analisis Faktor-faktor Pengaruh dan Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil analisis data dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Analisis Data Pemahaman Pegawai tentang SIMDA Keuangan

Tema yang ditemukan	Responden	Triangulasi	
		Informasi yang disampaikan	Sumber Data
Pemahaman Makna SIMDA Keuangan	KAA (Kepala Bagian)	Sistem yang berbasis komputerisasi untuk mengolah transaksi-transaksi keuangan	Wawancara, Observasi
Tujuan dan Manfaat SIMDA Keuangan	KAN (Kepala Sub Bagian Penanggungjawab Keuangan)	Dalam sisi Pelaporan 1. Mempermudah proses penyajian RKA, DPA, dan SPD untuk bagian anggaran 2. Memperbaiki sistem pengolahan data keuangan pemerintah	Wawancara, Observasi
Output yang Dihasilkan	PAC (Staf pelaksana SIMDA bag. Akuntansi dan Pelaporan)	Terdapat 3 laporan yang dihasilkan dari Simda Keuangan untuk bagian anggaran yaitu RKA, DPA, dan SPD Laporan yang dihasilkan dari pengolahan data SIMDA Keuangan pada bagian akuntansi yaitu buku besar, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan neraca.	Wawancara, Observasi

Tabel 2. Analisis Data Faktor-faktor Pengaruh

Tema yang ditemukan	Responden	Triangulasi	
		Informasi yang disampaikan	Sumber Data
Komunikasi	KAA (Kepala Bagian)	Penerapan SIMDA Keuangan dikomunikasikan terlebih dahulu Sosialisasi tentang penerapan SIMDA Keuangan dilakukan secara bertahap dan kadang-kadang secara tidak langsung	Wawancara, Observasi
Pencatatan Aset	PAB (Staf pelaksana SIMDA bag. Penatausahaan)	Pencatatan atau Pembukuan aset yang belum maksimal	Wawancara, Observasi
Sumber Daya Manusia	KAA (Kepala Bagian)	Tidak ada pelatihan khusus atau diklat SIMDA yang diadakan oleh BPKP Peningkatan SDM melalui diskusi/curah pikir dengan kepala kantor atau sesama pegawai SDM masih kurang dalam jumlah maupun Kapasitas.	Wawancara, Observasi

Disposisi/Sikap	KAA (Kepala Bagian	Sangat setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena lebih memudahkan dalam membuat Laporan Sangat membantu dalam proses Transaksi keuangan dan lebih mengefektifkan waktu	Wawancara, Observasi
Struktur Birokrasi	KAA (Kepala Bagian	Tidak terdapat pengawasan yang baik terhadap SIMDA sehingga kadang terjadi kegagalan sistem Proses Mutasi dan Pelantikan Pegawai yang tidak mempertimbangkan kebutuhan	Wawancara, Observasi
Ketersediaan Jaringan	PAC (Staf pelaksana SIMDA bag. Akuntansi dan Pelaporan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang mana semua pengoperasian berbasis Teknologi internet, terkadang mengalami kendala Internet.	Wawancara, Observasi
Faktor Eksternal	KAA (Kepala Bagian	Psikologi pegawai pengelola keuangan juga secara tidak langsung berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.	Wawancara, Observasi

Tabel 3. Analisis Data Kualitas Informasi yang Dihasilkan SIMDA Keuangan

Tema yang ditemukan	Responden	Triangulasi	
		Informasi yang disampaikan	Sumber Data
Andal	PAC (Staf pelaksana SIMDA bag. Akuntansi dan Pelaporan	Informasi yang dihasilkan dapat Diandalkan	Wawancara, Observasi
Ketepatan Waktu	PAC (Staf pelaksana SIMDA bag. Akuntansi dan Pelaporan	Pelaporan keuangan belum dapat dilakukan tepat waktu sesuai <i>deadline</i> yang telah Ditentukan	Wawancara, Observasi
Relevan	PAC (Staf pelaksana SIMDA bag. Akuntansi dan Pelaporan	Setiap transaksi dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing secara otomatis oleh sistem Setiap menu aplikasi yang terdapat dalam SIMDA Keuangan saling berhubungan	Wawancara, Observasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan telah diterapkan dengan baik. Hal ini terlihat dari pemahaman pegawai mengenai SIMDA itu sendiri dan cara penggunaan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan SIMDA Keuangan pada Sekretariat Daerah secara optimal, antara lain:
 - 1) Komunikasi atau sosialisasi yang aktif mengenai tujuan penerapan atau manfaat dari penerapan sistem tersebut.
 - 2) Rekonsiliasi Aset yang belum maksimal karena pencatatan yang tidak teratur.
 - 3) Sumber Daya Manusia yang belum memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya.
 - 4) Adanya sikap implementor yang menerima/setuju atas pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan serta dukungan dari kepala kantor/pemimpin.
 - 5) Struktur Birokrasi yang mana proses mutasi dan pelantikan pegawai dalam lingkup Pemda tidak memperhatikan kebutuhan dan tugas pegawai yang ada, sehingga mempengaruhi proses pelaporan keuangan. Serta belum adanya operator khusus yang mengawasi dan mengoperasikan aplikasi SIMDA sehingga terkadang terjadi kegagalan sistem
 - 6) Ketersediaan Jaringan Internet yang terkadang mengalami gangguan sehingga menghambat dalam pengoperasian Aplikasi SIMDA
 - 7) Faktor Eksternal dari pegawai pengelola keuangan sendiri juga sangat berpengaruh pada kualitas kerja di tempat kantor, sehingga mempengaruhi juga kualitas ketepatan waktu laporan keuangan.
3. Kualitas informasi yang dihasilkan dari

penerapan SIMDA keuangan dapat dipertanggung jawabkan dengan kualitas laporan keuangan yang andal namun belum memenuhi syarat ketepatan waktu.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil olah data yang dilakukan maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam penerapan SIMDA Keuangan sebagai sistem komputerisasi pengolahan data keuangan perlu mengembangkan pemahaman pegawai tentang maksud dan tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan serta memahami faktor-faktor penghambat maupun pendukung yang perlu dimiliki oleh instansi tersebut antara lain :
 - 1) Meningkatkan Komunikasi atau sosialisasi yang aktif mengenai tujuan penerapan atau manfaat dari penerapan sistem tersebut.
 - 2) Memaksimalkan Rekonsiliasi Aset sehingga pencatatan dapat teratur.
 - 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam bentuk Pendidikan maupun Pelatihan.
 - 4) Dalam proses mutasi dan pelantikan pegawai dalam lingkup Pemda harus lebih mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan tugas pegawai yang ada, sehingga tidak mempengaruhi proses pelaporan keuangan.
 - 5) Mempersiapkan Operator khusus yang mengawasi dan mengoperasikan aplikasi SIMDA sehingga tidak terjadi kegagalan sistem.
 - 6) Memperkuat Jaringan Internet yang terkadang mengalami gangguan sehingga menghambat dalam pengoperasian Aplikasi SIMDA.
 - 7) Faktor Eksternal dari pegawai pengelola keuangan sendiri menjadi perhatian khusus dari atasan langsung sehingga mengurangi factor yang mempengaruhi kualitas ketepatan waktu laporan keuangan
2. Diharapkan agar Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang

penerapan SIMDA Keuangan menggunakan teknik pengumpulan data lain seperti observasi dan studi dokumen serta pada instansi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G. Subarsono (2005) *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Bahra bin Ladjamudin. (2005) *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asmawi, Syafael, & Yamin, M. (2010) 'Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi', *Jurnal Teknologi Pendidikan*.
- Bambang, W. (2008) *Konsep Sistem Informasi dari BIT sampai ke DATABASE*. Yogyakarta: Andi.
- BPKP (2007) *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Jakarta: BKPP.
- BPKP (2008) *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)*, web site. Available at: <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/33/versi-2.1.bpkp>.
- Budiman, Fuad dan Arza, F. I. (2013) 'Pendekatan Technology Acceptance Model dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah', *Jurnal WRA*.
- Cholih, A. (2011) *Pengantar Manajemen*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Dewi, N. C. and Mariska, S. (2018) 'Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintahan Kota Pariaman', *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3(1), pp. 63–70.
- Edward, G. C. (1980) *Implementing Public Policy*. Whashington DC: Congressional Quanterly Press.
- Hasibuan, M. S. P. (2009) *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jensen, M., C. and MEckling, W. M. (1976) 'heory o f the firm: Managerial behavior, agency cost a nd ownership structure', *Journal of Finance Economic*, 3, pp. 305–360. Available at: <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensen-%0Ameckling-76.pdf>.
- Jogiyanto, H. . (2005) *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiono, Arief, Yanuar Nanok Soenarno, and Synthua Madya Kusumawati. 2010. "Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: untuk Bisnis Skala Kecil dan Menengah." Jakarta: Grasino.
- Manangkey, Natasya. 2014. "Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang dan Penerapan Akuntansi Pada PT Cahaya Mitra Alkes." *Jurnal EMBA*, Vol. 2, Hal.1151-1161. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Sam RATulangi, Manado.
- Albercht,W. Steve, Albercht, Conan C., and Albercht, Chad O. 2006. *Fraud Examination Second Edition*. Canada: Thomson South-Western.
- The Institute of Internal Auditors. 2017. "International Standards for The Profesionals Practice of Internal Auditing 2017". Retrieved from <https://na.theiia.org>, on 1st March 2019.
- Kadir, A. (1997) *Tuntunan Praktis Pemrograman Visual dBase 5.5.*. Jakarta: PT.Elex Media koputindo.
- Kadir, A. (2003) *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo (2004) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Dalam Negeri (2002) *Kep Mendagri Nomor 29 Tahun2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pen, Keputusan Menteri Dalam Negeri*. Jakarta.
- Moleong, L. (2005) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003) 'UU No17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

- Negara', *Journal of Chemical Information and Modeling*. Jakarta, p. 17.
- Pemerintah Republik Indonesia (2004) *UU nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta. Available at: <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>.
- Pemerintah Republik Indonesia (2005) *Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (2006) *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta